



## **Analisis Perilaku ASN Sipir Dalam Melakukan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru**

**Afrizal<sup>1</sup> Rusdi<sup>2</sup> Afrinaldy Rustam<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , Jalan. H.R Soebrantas Panam, Km.15 No. 155, Tuah  
Madani Kec. Tampan, Kabupaten Kampar, Indonesia Riau  
afrizal.msi@uin-suska.ac.id rusdihalis72@gmail.com Ocu\_1974@yahoo.com

Received : April 23, 2021; Accepted : September 30 April, 2021

DOI 10.25299/jiap.2021.vol7(1).6754

### **Abstract**

*Correctional officers as one of the State Warden Apparatus (ASN) in carrying out their duties are expected to be expected to be professional and in accordance with the provisions of the applicable law. The formulation of the research problem is the behavior of the warden in coaching prisoners, and what are the obstacles in implementing coaching at the Class IIA Pekanbaru Penitentiary?. This type of research is a qualitative research that aims to build a preposition and explain the meaning behind the social reality that occurs. Observation, In-depth Interview and Documentation are the techniques used to collect data. Data were analyzed by data reduction. Data presentation and conclusion. The informants in this study were the Ministry of Law and Human Rights of Riau Province. the Correctional Institution and several inmates. The results of this study are differences in behavior in Correctional Institutions in carrying out basic and different tasks required, different willingness and ability and education possessed. But in general, the warden in carrying out the guidance is in accordance with the goals of the institution, although there are still some shortcomings. There are several advantages in the implementation of coaching, namely excess occupancy capacity, the coaching program cannot run effectively, and the lack of attention from the policy makers in handling the coaching carried out for the inmates.*

**Key Word :** Behavior, ASN Sipir, Coaching

### **Abstrak**

Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu dari Aparatur Sipir Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas-tugasnya diharapkan dapat bersikap profesional dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku Namun terkadang dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan dan kekurangan yang dimiliki petugas tersebut. Rumusan masalah penelitian ini bagaimanakah perilaku Sipir dalam pembinaan Narapidana, dan apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru ?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk membangun suatu preposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Observasi, Wawancara mendalam dan Dokumentasi adalah tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Data dianalisis dengan reduksi data.penyajian data dan penarikan kesimpulan Informan dalam penelitian ini adalah Pihak Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Riau. pihak Lembaga Pemasyarakatan dan beberapa warga binaan. Adapun hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan perilaku Sipir di Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dipengaruhi oleh Kebutuhan yng berbeda, kemauan dan kemampuan yang tidak sama serta Pendidikan yang dimiliki. Namun secara umum perilaku Sipir tersebut dalam melaksanakan pembinaan sudah sesuai dengan tujuan institusi, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan, yakni kelebihan kapasitas hunian, program pembinaan tidak dapat berjalan dengan efektif, dan kurangnya perhatian pihak pengambil kebijakan dalam mengatasi persoalan pembinaan yang dilakukan bagi warga binaan.

**Kata Kunci :** Perilaku, SASN Sipir, Pembinaan

## Pendahuluan

Masalah Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup baik secara individual maupun berkelompok senantiasa dihadapkan pada keharusan untuk melakukan tindakan dan interaksi sosial. Oleh karenanya dalam konteks hubungan seperti itu, maka diperlukan adanya keteraturan sehingga setiap orang dapat berhubungan secara harmonis dengan individu maupun kelompok lain. Keteraturan yang diinginkan hanya dapat tercipta karena adanya aturan atau pada fase tertentu sering disebut dengan hukum. Hukum ditujukan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan keteraturan ditengah masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tindakan dan interaksi sosial tersebut seringkali dihadapkan dengan berbagai macam benturan, konflik, melawan hukum, bahkan tidak jarang harus berhadapan dengan proses hukum. Bagi individu yang melakukan pelanggaran hukum terutama terkait dengan tindakan pidana, tentu akan dikenakan sanksi diantaranya berupa kurungan (penjara). Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan ketentraman dan menghilangkan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya untuk menginginkan penegakan hukum berlaku efektif maka harus ada tempat untuk melakukan perubahan. Salah satu tempat melakukan perubahan dalam konteks ini adalah Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya melakukan pengekangan kebebasan secara fisik saja, namun juga diharapkan mampu memberikan pembimbingan

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami (natural) atau disebut juga penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu preposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Metode penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi lapangan, lebih peka terhadap perubahan pola/nilai dan bahkan data yang ada di lapangan (Moleong,2005;29) Teori dalam penelitian kualitatif tidak semata-mata dimaksudkan untuk dibuktikan (verification), namun dapat saja dikembangkan berdasarkan data yang dikumpulkan (falsification). Oleh karenanya maka penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong,2002;31)

### 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Riau, khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan November 2020 hingga februari 2021..

### 3.3. Proses Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam mencari data-data dilapangan. Sebagaimana ciri-ciri penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai

Komponen analisa data yang dilakukan adalah reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan Reduksi a. data, merupakan proses pemilihan, perumusan perhatian, pengabstraksian dan transformasi data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. Dari awal misalnya melalui kerangka konseptual. permasalahan,

pendekatan pengumpulan data yang diperoleh, membuat ringkasan, mencari tema-tema,, b. Penyajian data, yakni sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian dapat berupa teks naratif, matriks, grafik dan bagan, yang penyajiannya harus tertata dengan baik. Penarikan Kesimpulan,

Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, Makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika deskriptif mengangkatnya sebagai temuan dalam melakukan penelitian.

3.6. Subjek Penelitian ( Informan ) Dalam penelitian ini peneliti menggali informasi dari beberapa informan dari pihak Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau, Pihak Lembaga Pemasarakatan serta beberapa Warga Binaan. Penentuan informan penelitian ini.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Pembinaan Ketrampilan Kerja Lapas Pekanbaru Kelas II A melaksanakan program pembinaan yang berkaitan langsung dengan keterampilan kerja Tujuan dari kegiatan ini adalah agar setelah selesai menjalani masa hukuman dan kembali ke tengah masyarakat, warga binaan memiliki keterampilan untuk berdiri diatas kaki sendiri Maksudnya adalah setelah selesai menjalani hukuman diharapkan dapat untuk hidup mandiri berkat dari pembinaan ketrampilan yang dilaksanakan selama menjalani masa tahanan. Berbagai program pembinaa telah dilakukan pihak Lembaga Pemasarakatan dalam upaya mewujudkan ketrampilan kerja bagi para

warga binaan dan program yang dibuat juga terjadwal dengan jelas. Namun dalam tataran implementasinya tidak semua program yang diajukan dapat terlaksana dengan baik. Pembinaan dan pelatihan yang diberikan dalam meningkatkan ketrampilan kerja warga binaan adalah pelatihan dibidang Jasa, Manufaktur dan juga Agrobisnis.

Bidang Jasa yang diberikan pembinaan/pelatihan diantaranya, Babershop, Desain Papan Bunga, Laundry, Cooking Trainer, Jasa Service Motor, Desain Kaligrafi, Teknik Pe:tukangan, Jasa reklame, Desain Kitchen Set dan lainnya. Sedangkan pelatihan bidang Manufaktur antara lain: Pengelasan, Pembuatan Jas Hujan, Pembuatan Plat nomor, Tas rajut, pembuatan kusen jendela, Sandal, Pembuatan sonket Riau, Pembuatan perabot bahan kayu. dsb. Selanjutnya pembinaan/ pelatihan dibidang agrobisnis berupa Penanaman Sayuran Hidroponik, Peternakan ayam kampung, Pembibitan jangkrik, pembibitan Belut, pembibitan jagung organik, pengolahan telur bebek, pembibitan cabe rawit, pengolahan hasil pertanian kedelai dan lainnya (jadwal dan jenis pelatihan terlampir). Pembinaan yang dilakukan disini melibatkan pihak ke tiga dalam upaya menghasilkan ketrampilan yang diharapkan. Wujud dari pembinaan ketrampilan kerja ini dibuktikan dengan adanya beberapa warga binaan yang telah bersertifikat dalam mengikuti program yang diberikan. Artinya mereka telah dinvatakan layak untuk bekerja dan telah memiliki ketrampilan sesuai dengan bidangnya.

Sebagaimana disinggung diatas tadi. bahwa tidak semua program ketrampilan kerja yang telah disusun sedemikian rupa tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Terdapat

banyak kendala dalam pelaksanaan pelatihan ketrampilan kerja ini, antara lain. a. Keterbatasan lahan yang dimiliki pihak Lapas untuk pelaksanaan program pembinaan. Saat ini luas lahan yang dimiliki pihak Lapas Kelas IIA Pekanbaru seluas 3.300m<sup>2</sup>, dan berada ditengah-tengah kota serta dikelilingi perumahan warga dan perkantoran. Pelaksanaan pelatihan bidang jasa, manufaktur maupun agrobisnis memerlukan cukup lahan. Bagaimana mungkin keberhasilan pembinaan bidang pertanian misalnya, dapat berhasil jika lahannya saja tidak ada, begitu pula dengan peternakan, pertukangan dan seterusnya.

Pelatihan ketrampilan yang diberikan tidak semuanya mampu menopang sebagai sumber pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan hidup bagi warga binaan, setelah mereka selesai menjalani masa hukuman. c. Terjadinya kekosongan kegiatan pelatihan. Tidak semua warga binaan memiliki kemauan mengikuti program pembinaan ketrampilan yang diberikan. Pihak Lapas dalam memberikan pelatihan ketrampilan melihat terlebih dahulu kesungguhan dan keinginan warga binaan yang mau mengikuti pelatihan. Warga binaan yang telah mendapatkan pelatihan ketrampilan kemudian mereka selesai menjalani masa hukuman (bebas), maka proses peserta yang diikutsertakan berikutnya perlu diajukan terlebih dahulu dan hal ini tentu berkaitan dengan anggaran. Jika usulan nama peserta diajukan kemudian anggaran belum disetujui, maka disilah kegiatan itu tidak dapat terlaksana sehingga terjadi kekosongan peserta dalam mengikuti kegiatan d. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan Program yang dilakukan. Keterbatasan anggaran yang dimiliki diantaranya mengakibatkan tidak semua

warga binaan memiliki kesempatan untuk dapat ikut dalam program yang dilakukan, serta menjadikan banyak program tidak terlaksana dengan baik. e. Tidak adanya kegiatan monitoring yang dilakukan pihak Lapas untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja yang telah diberikan selama ini. f. Kurangnya perhatian pemerintah baik Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah maupun pihak Legislatif dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan dalam program pembinaan di Lapas, seperti keterbatasan lahan yang diperlukan, bangunan yang dibutuhkan untuk mencegah overkapasitas, anggaran yang disediakan. Tidak adanya upaya untuk memberikan rekomendasi kepada pihak perusahaan/perekrut tenaga kerja untuk dapat memberdayakan warga binaan yang telah memiliki ketrampilan kerja setelah selesai menjalani masa hukuman. h. Mutasi pegawai. Sebagian kegiatan pembinaan dapat dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang ada pada Lapas. Namun mutasi pegawai yang dilakukan dalam waktu berdekatan berdampak terhadap program yang dibangun selama ini.

## **Kesimpulan**

Terdapat perbedaan perilaku yang ditunjukkan masing-masing individu termasuk PNS Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal pembinaan warga binaan. Perbedaan perilaku tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan yang berbeda, kemauan dan kemampuan yang tidak sama serta Pendidikan yang dimiliki. Namun dari penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa secara umum perilaku yang ditunjukkan para pegawai Lapas dalam melakukan pembinaan sudah sesuai

dengan iujuan institusi. meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. 2 Keleb han kapasitas humian bagi warga binaan merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan di Lembaaga Pemasarakatan serta berdampak pula pada ketidakberhasilan program pembinaan yang dilakukan. 3. Secara umum dapat dikatakan bahwa masih terdapat banyak program pembinaan yang dilakukan tidak berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki 4. Masih kurangnya perhatian pihak pengambil kebijakan dalam mengatasi persoalan- persoalan warga binaan maupun permasalahan pembinaan yang dilakukan kepada warga binaan.

#### Daftar Pustaka

- Undang Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang - Undang NO.31 tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan
- Alatas, Syed Hussein. 1986. Sosiologi Korupsi, LP3ES Jakarta
- Kasali, Rhenald. 2015. Change Leadership Non-Finito, Mizan, Jakarta
- Kumorotomo. Wahyudi 2008 Akuntabilitas Birokrasi Publik Pustaka pelajar lembaga administrasi negara Yogyakarta.
- LAN. 2008. Etika Kepemimpinan Aparatur. Jakarta
- Laoly, H Yasonna 2019 Birokrasi Digital. Jakarta : Pustaka Alvabet
- Moleong, I exy.J 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung, Remaja Rosda Karya
- 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rasyid, Ryaas. 1997. Makna Pemerintahan Kepemimpinan. Jakarta : Yasrif
- Watampoe Tinjauan dari Segi Etika dan Siagian, Sondang P. 1994. Patologi Birokrasi terapinya. Ghalia Indonesia Jakarta
- Analisis Administrasi dan Sugiono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung. Tempo Edisi 19-25 November 2018. Hal. 44-45 kampanye Setengah hati
- Thoha, Miftah. 2002. Persepektif Perilaku Birokrasi., Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005,
- Prilaku organisasi, konsep dan aplikasinya., PT. Raja Grafindo, Jakarta Peratran
- Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara